



SINOPSIS

Judul buku: Mengurai Masalah Bangsa Dan Negara : Refleksi Pemikiran Kepemimpinan Dan Kenegarawanan Menuju Indonesia Baru

Penulis : Dr. Ir. H. Johan O Silalahi, MH.

Dalam buku ini secara umum mengkritisi berbagai hal mengenai partai politik dan sistem multipartai yang terbukti kurang efektif dalam mencapai stabilitas berdemokrasi. Sistem multipartai dinilai justru membawa kearah "politik biaya tinggi" yang menjerumuskan para pelaku politik kepada perilaku korupsi dan bermuara pada terbentuknya negara kleptokrasi (negeri para pencuri). Di era reformasi ini, dinilai masih ada praktek otoritarianisme oleh elite bangsa kita, atau era reformasi adalah "kemasan baru era orde baru".

Dalam Bab 1 dan 2 Karakter dan Budaya Manusia Indonesia mengkritik tentang perilaku "manusia Indonesia baru" yang masih terjebak pada perilaku yang egois-individualistis, konsumtif-materialistis, hedonis, dan munafik-oprtunistis. Manusia Indonesia telah lupa dengan budaya adiluhung bangsa dan pentingnya membangun karakter bangsa dengan bertumpu pada peningkatan dayaasaing masyarakat.

Masalah bangsa kita menyebutkan bahwa para politisi kita sebaiknya berbisnis dahulu sebelum memulai menjadi politisi. Sebab politik adalah pengabdian, keuntungan dari bisnis itulah yang mestinya diabdikan pada negara, baik melalui pajak maupun kepada partai politik pilihannya. Ongkos politik bangsa ini cukup besar, sehingga keteladanan politisi sangat penting. Selain itu, kesenjangan pendidikan dan isu SARA masih menjadi persoalan di negeri ini. Solusinya adalah perombakan sistem yang dikawal terus oleh sumberdaya manusia yang baik.

Dalam bab terakhir yaitu mengenai Pemimpin Bangsa, penulis mengakui bahwa pemimpin ideal (dengan plus-minusnya) justru Soekarno dan Soeharto. Namun, penulis juga mengakui bahwa keteladanan pemimpin itu penting berikut etika kepemimpinan yang dikembangkannya.

Teori sejarah berulang menyoroti kebijakan Orde Lama yang mengangkat Presiden Soekarno seumur hidup, meski gagal, namun "tidak mengangkat" Soeharto sebagai presiden seumur hidup meski kenyataannya ia berkuasa lebih dari 30 tahun. Kedua hal ini muncul akibat tidak adanya "balance of power", sehingga kedepan rakyat Indonesia tetap diberikan kebebasan untuk menentukan wakilnya di lembaga-lembaga negara.